

## Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)<sup>1</sup>

Oleh:

Drs. Hiryanto, M.Si<sup>2</sup>

### A. Pendahuluan

Pendidikan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, dikenal dalam tiga jalur yaitu jalur pendidikan informal, jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal, dimana antara jalur-jalur tersebut saling melengkapi dalam mengembangkan sumberdaya manusia.

Pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat ayat 4, diuraikan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim dan satuan pendidikan yang sejenis.

Satuan pendidikan nonformal yang saat ini berkembang pesat adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang pada awal rintisannya didirikan di tingkat kecamatan kemudian menyebar ke tiap desa atau kalurahan.

Pada awal berdirinya PKBM merupakan tempat belajar bagi warga masyarakat di sekitar PKBM itu berada. PKBM didirikan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kegiatan utama PKBM adalah membelajarkan masyarakat melalui berbagai layanan program pendidikan luar sekolah. Dimana berdirinya PKBM diilhami oleh gagasan pusat belajar masyarakat (*community learning center*) yang terdapat di berbagai negara maju sejak sekitar enampuluhan, serta adanya kebijakan tentang broad based learning. UNESCO (1993), mendefinisikan PKBM sebagai tempat belajar yang terorganisasi dimana orang-orang dapat belajar.

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam Pelatihan Tenaga Pendidik PKBM Sejahtera Sleman, DIY, tanggal 3 Januari 2009

<sup>2</sup> Dosen Jurusan PLS FIP UNY

Sebagai institusi yang didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat, PKBM memiliki potensi sebagai institusi yang mandiri. Meskipun awal berdirinya banyak PKBM yang bergantung pada bantuan dan dana block grant dari pemerintah, dalam jangka panjang diharapkan pada sebagian besar PKBM akan tumbuh kemandirian, dalam hal ini peran dominan pemerintah yang selama ini menjadi semakin berkurang dan lebih pada peran fasilitasi akan dapat berjalan seiring dengan kemandirian PKBM. PKBM akan berdiri kokoh atas keswadayaan masyarakat.

Beberapa potensi PKBM yang dapat dikembangkan, *pertama*, seiring dengan posisi sebagai institusi pendidikan yang berbasis pada masyarakat (*community based education*) yang dalam aktualisasinya dicirikan adanya (1) dukungan dari masyarakat dalam berbagai bentuk; (2) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (3) kemitraan di mana warga masyarakat ikut menjalin hubungan yang sejajar dengan pengelola program; (4) kepemilikan di mana warga masyarakat ikut mengendalikan semua keputusan yang berkaitan dengan program-program pendidikan luar sekolah, *kedua*, dilihat dari layanan program yang dapat dilaksanakan PKBM memiliki potensi untuk menyelenggarakan seluruh program pendidikan nonformal dan informal, yang mencakup: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, *ketiga*, dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran masyarakat PKBM dapat menerapkan prinsip belajar kelompok dimana warga belajar bisa melaksanakan kegiatan belajar bersama warga belajar yang lain dalam suatu kelompok belajar, juga potensi pembelajaran dengan pendekatan integratif, dimana suatu proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada pembelajaran satu aspek tertentu saja dari sekian banyak aspek kehidupan manusia tetapi suatu proses yang memadukan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu layanan program pembelajaran pendidikan luar sekolah, *keempat*, potensi lain yang dimiliki PKBM sebagai institusi pembelajaran masyarakat adalah kemampuan dalam bekerjasama secara kolaboratif dan sinergis dengan berbagai institusi lain yang

ada di dalam masyarakat baik yang menyelenggarakan aktivitas pendidikan maupun aktivitas lain yang memiliki tujuan yang sejalan dengan PKBM yaitu membangkitkan masyarakat dari berbagai ketertinggalan, dan *kelima*, PKBM dalam proses pembelajaran menempatkan sasaran warga belajar masyarakat sebagai subjek didik yang harus aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi dirinya dan masyarakat, PKBM memposisikan warga belajar sebagai individu yang memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan diri, masyarakat dan institusi PKBM itu sendiri, dan terakhir sebagai institusi yang berada di dalam masyarakat dan didirikan dengan maksud untuk membelajarkan masyarakat, maka kehadiran PKBM berpotensi untuk memberdayakan masyarakat secara keseluruhan dalam arti dapat membantu kelompok-kelompok marginal agar mereka mampu memiliki potensi yang seimbang dengan kelompok-kelompok lainnya yang lebih mampan kehidupan sosial ekonominya, dengan menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau sehingga dapat terangkat derajatnya, hak-haknya baik sosial maupun ekonomi.

Banyaknya potensi yang dimiliki akan berbuah menjadi kenyataan atau sebaliknya tetap potensi sangat tergantung dari pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh para pengelola PKBM maupun para tenaga pendidik maupun kependidikan yang terlibat di dalamnya maupun keperdulian dari berbagai pihak termasuk pemerintah.

Dalam makalah singkat ini akan dicoba dikupas secara singkat strategi pengelolaan dan pengembangan PKBM agar potensi yang dimiliki dapat berkembang.

## **B. Masalah dan Tantangan yang dihadapi PKBM**

Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki PKBM sebagai tempat yang terorganisasi di mana warga belajar masyarakat dapat belajar di tempat itu sekaligus merupakan tempat belajar yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta mengembangkan segala potensi warga belajar dan masyarakatnya, memiliki perbedaan dalam perkembangannya.

Perbedaan perkembangan PKBM lebih disebabkan oleh perbedaan dalam komponen-komponennya, *pertama*, adanya perbedaan dalam kepemilikannya (ada PKBM perorangan, yayasan, pondok pesantren, LSM, desa, dsb), *kedua*, perbedaan sumberdaya manusia yang mengelolanya, *ketiga*, perbedaan karena kemampuan dana, walaupun sampai saat ini sebagian besar PKBM memperoleh dana dari pemerintah, *keempat*, perbedaan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki masing-masing PKBM dan kelima, perbedaan dalam jumlah dan jenis layanan program pendidikan yang diselenggarakan oleh PKBM.

Atas dasar karakteristik pengelolaannya, PKBM dalam diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu: PKBM yang berbasis kelembagaan, yaitu PKBM yang inisiatif pembentukannya dan pengelolaan dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah, ciri utamanya semua sarana dan prasarana termasuk dana disediakan oleh lembaga, PKBM yang berbasis komprehensif, yaitu PKBM yang inisiatif pembentukannya dari lembaga namun dalam pengelolaannya dilakukan secara bersama dengan masyarakat sekitar dan PKBM berbasis masyarakat, merupakan PKBM yang inisiatif pembentukannya, pengelolaan dan penyelenggaraan dari dan oleh masyarakat, unsur lain lebih berperan sebagai mitra dan fasilitator.

Adanya perbedaan pengelolaan maupun faktor lainnya menyebabkan masalah dan tantangan yang dihadapi masing-masing PKBM juga berbeda. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdjazifah ER, dkk pada tahun 2005, terdapat sejumlah permasalahan internal yang dihadapi PKBM dilihat dari tingkat pencapaian standar mutu minimal yang perlu dicapai antara lain: (1) kurangnya kemampuan PKBM untuk mengembangkan program-program pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan kebutuhan setempat, hampir seluruh PKBM melaksanakan program-program pembelajaran yang ditawarkan oleh pemerintah; (2) beberapa pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah yang telah disediakan jarang dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya, berakibat munculnya permasalahan dalam pelaksanaan; (3) tingkat pencapaian mutu minimal penyelenggaraan PKBM belum tercapai baik pada kegiatan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran, pemberian

layanan informasi, perluasan jaringan kerjasama, maupun pada kegiatan pembinaan tenaga kependidikan.

Permasalahan ini didukung oleh temuan lain di Jawa Barat antara lain: *pertama*, pendirian PKBM diduga kuat bukan didasari pertimbangan kebutuhan atau kesadaran para pemakranya akan perluasan hak-hak pendidikan masyarakat, tetapi sebagai respon untuk bagaimana membuat wadah untuk menampung kucuran block grant dari pemerintah. Yang penting ada wadah dulu, bagaimana praktek pendidikan akan dijalankan itu soal yang lain lagi. *Kedua*, rendahnya kepemilikan komunitas, menurut data, PKBM didominasi oleh pegawai negeri, orang-orang yang pekerjaan utamanya menjadi TLD, penilik dan guru mendominasi kepengurusan baik ditingkat ketua (53,68%) maupun sekretaris (56,5%), dimana yang menarik ada jumlah profesi rangkap. Guru yang notabene sudah mendapat gaji dari pekerjaan mengajarnya di sekolah formal ikut terlibat dalam kepengurusan PKBM (21, 73 % pada posisi ketua dan 27,53 % pada posisi sekretaris). Apa artinya?. Artinya menguatkan temuan pertama bahwa pendirian PKBM patut diduga kuat diprakarsai oleh orang-orang yang mempunyai akses informasi yang cukup besar terhadap kebijakan-kebijakan baru pendidikan, termasuk didalamnya tata cara mengakses block grant dan sebagainya. Atau sekurang-kurangnya informasi tentang hal ini lebih banyak tersebar di lingkaran terbatas, yaitu “orang-orang dalam” Depdiknas. Dimana gejala ini diperkuat dengan siapa yang mengelola atau bentuk organisasi PKBM, sebanyak 56,6 % PKBM dikelola oleh yayasan, yang notabene bentuki organisasi yang kepemilikannya berada di tangan segelintir orang, disamping itu sebagian besar PKBM masis berbasis kelembagaan, belum berbasis masyarakat. *Ketiga*, rendahnya relevansi program dengan kebutuhan masyarakat. Program-program PKBM umumnya adalah “program-program paket” yang sudah distandarisasi, seperti Keaksaraan Fungsional, Paket A, Paket B, Paket C, Beasiswa kursus, KWD, KWK, KPP dan lain-lain yang serupa itu. Program-program ini memang yang disarankan untuk dilakukan PKBM jika ingin mengakses dana block grant. Cukup banyak juga materi-materi belajar tentang ketrampilan, tetapi hampir semua jenis-jenis ketrampilan yang berorientasi teknis produktif, dan semua program

baik paket maupun keterampilan masih jauh dari hubungannya dengan potensi desa/daerah.

Selain permasalahan yang dihadapi, PKBM juga menghadapi tantangan agar PKBM ke depan lebih berfungsi dalam melaksanakan program-program pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan yang berasal dari internal maupun eksternal yang harus dipertimbangkan dan dicari pemecahannya dalam rangka meningkatkan fungsi dan kinerja PKBM. Secara internal PKBM menghadapi tantangan berupa rendahnya kemampuan para pengelola PKBM pada umumnya untuk mengembangkan PKBM sebagai institusi PLS yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan geografis maupun perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi, yang berakibat PKBM menghadapi kendala dalam menghasilkan berbagai program pendidikan luar sekolah yang berbasis pada kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya, dimana kemampuan merencanakan dan mengembangkan program-program PLS yang dikembangkan sendiri belum merata dimiliki oleh para pengelola dan pemangku kepentingan lain di tingkat PKBM, selain itu sebagaimana temuan di Jabar, PKBM menghadapi tantangan masih kuatnya ketergantungan terhadap bantuan dan dukungan dana dari pemerintah melalui berbagai hibah yang diberikan, tantangan lain adalah rendahnya kemampuan PKBM dalam membuat dan mengajukan proposal kegiatan yang dapat didanai. Terdapat kecenderungan bahwa dana hibah jatuh ketangan PKBM yang memang memiliki kemampuan untuk membuat dan mengajukan usulan (proposal) kegiatan, sering terjadi PKBM yang memperoleh dana hibah dari tahun ke tahun itu-itu saja, oleh karena itu tantangan PKBM pada umumnya adalah meningkatkan kemampuan bersaing dengan PKBM lain dalam perolehan dana hibah dari pemerintah maupun founding lainnya. Sedangkan tantangan berat lain yang dihadapi PKBM dalam jangka panjang adalah meningkatkan mutu pengelolaan dan mutu program pendidikan luar sekolah yang ditawarkan kepada masyarakat. Dimana dewasa ini konsep mutu menjadi suatu keharusan, yang sering diterapkan dalam dunia bisnis dan pendidikan, seperti adanya Akreditasi Lembaga, sertifikasi ISO 9000-2001 dan sebagainya. Secara rinci menurut Yoyon Suryono (2007:34) PKBM menghadapi persoalan peningkatan mutu yang mencakup; (1) apakah program-program

pembelajaran yang dikembangkan sudah diarahkan pada kepentingan warga belajar atau para pelanggan lainnya (stakeholder), (2) apakah semua pemangku kepentingan PKBM sudah terlibat secara sungguh-sungguh dalam pengelolaan dan pengembangan PKBM, (3) apakah dalam mengelola PKBM dan menyelenggarakan program pembelajaran penilaian (evaluasi) sudah dilaksanakan dengan semestinya, PKBM tidak mungkin memenuhi standar mutu yang sudah ditentukan oleh masyarakat tanpa memiliki alat ukur untuk menilai kemajuan hasilnya, (4) apakah semua pihak yang berkepentingan dengan PKBM sudah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan mutu dan (5) apakah upaya perbaikan dan peningkatan mutu pengelolaan PKBM dan penyelenggaraan program-program pembelajaran sudah dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Pengembangan PKBM berkait juga dengan pengembangan kelompok-kelompok belajar yang sudah ada di dalam PKBM itu sendiri, oleh karena itu tantangan penting lain yang dihadapi oleh PKBM adalah bagaimana mengembangkan kelompok-kelompok belajar itu yang mengarah pada meningkatnya kinerja kelompok belajar yang ditandai dengan (1) meningkatnya partisipasi warga belajar, (2) terjadinya proses demokrasi dalam kehidupan kelompok, (3) meningkatnya kesetaraan kedudukan pada semua pemangku kepentingan yang memungkinkan terjadinya proses pembebasan pada warga belajar dan (4) meningkatnya derajat kehidupan warga belajar dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan menjadi kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dapat meningkatkan derajat kehidupannya.

### **Strategi Pendekatan Pengelolaan dan Pengembangan PKBM**

Untuk mengembangkan PKBM sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal dan sekaligus institusi pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dari masyarakat sendiri banyak konsep dan teori yang dapat dipergunakan baik melalui pendekatan pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat.

Dalam makalah ini hanya akan dibahas dua strategi pendekatan yaitu pendekatan pengembangan kemampuan dan pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan PKBM.

Strategi pendekatan pertama, yang dapat digunakan untuk pengembangan adalah **pendekatan pengembangan kemampuan**, yaitu suatu upaya meningkatkan kemampuan orang dan lembaga secara berkelanjutan, kompetensi dan kemampuannya memecahkan masalah, atau pengertian lain yang sering dipergunakan yaitu suatu pendekatan pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis untuk 1) memberdayakan individu agar mampu mengubah kehidupannya, 2) menumbuhkembangkan potensi-potensi individu yang pada akhirnya dapat diwujudkan dalam tindakan kolektif, 3) memerangi kemiskinan, penindasan dan deskriminasi dan 4) mewujudkan potensi-potensi manusia melalui penciptaan keadilan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pada pengertian di atas maka pendekatan pengembangan kemampuan, harus ditekankan pada beberapa konsep antara lain: *pertama*, pengembangan kemampuan dirancang untuk memberdayakan individu yang mampu mewujudkan eksistensi secara mandiri dan kolektif, *kedua* merupakan upaya untuk membantu sebagian peran negara dalam menciptakan otonomi dan kemandirian masyarakat, *ketiga* harus selalu mengalami penyesuaian dengan tuntutan lingkungan dan tingkat kepentingannya, keempat, tidak hanya berhubungan dengan finansial tetapi yang jauh lebih penting adalah aspek-aspek yang kurang kasat mata seperti aspek sosial, politik, organisasi dan manajemen dan kelima, pengembangan kemampuan merupakan konsep makro yang dapat diimplementasikan secara berbeda sesuai dengan konteks situasi, tuntutan sosial-politik yang ada

Dalam pendekatan pengembangan kemampuan ada tiga strategi yang dapat dipergunakan yaitu, *pendekatan individual, organisasi dan jaringan*. Strategi pendekatan individu menekankan pada pentingnya posisi dan peran manusia dalam pembangunan, strategi yang kedua adalah pendekatan organisasi, yang dikenal dengan pengembangan kelembagaan (institutional building), yaitu bagian dari investasi masa depan yang menekankan pada upaya meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja organisasi yang tinggi sebagai gambaran organisasi yang diharapkan atau diidealkan ditandai oleh sejumlah karakteristik organisasi sebagai berikut: (1) menawarkan dukungan bersama dan solidaritas, (2) memperkuat harga diri dan kepercayaan bersama, (3) memperbaiki kapasitas individu untuk melawan kemiskinan, ketidakadilan, dan

penindasan melalui tindakan kolektif, (4) berfungsi sebagai forum untuk belajar, (5) mempromosikan diskusi dan analisis persoalan bersama, (6) meningkatkan partisipasi individu dalam berbagai proses politik, (7) mampu melakukan lobi atas masalah-masalah politik yang merupakan kepentingan nyata, (8) memiliki akses terhadap pemerintah dan institusi-institusi yang berpengaruh dan (9) mampu melakukan negosiasi dengan para aktor lain.

Strategi pendekatan yang ketiga, adalah pembentukan jaringan dan kemitraan yang sejalan dengan semakin canggihnya teknologi, karena adanya dua alasan yaitu: untuk membagi dan menyebarkan gagasan dan informasi untuk dapat saling belajar, serta untuk mengintegrasikan pengalaman dan energi para aktor yang terlibat didalamnya agar dapat meningkatkan dampak individu dan kolektivitasnya. Suatu jaringan akan efektif manakala dipenuhinya beberapa hal berikut: (1) adanya pola kemitraan yang saling menghormati serta akses yang sama terhadap sumberdaya, (2) adanya kepentingan bersama antar individu dan antar individu dengan organisasi, (3) adanya kemampuan manajemen jaringan yang baik yang difasilitasi oleh organisasi dengan tetap memperhatikan kebebasan.

Konsep pengembangan kemampuan lebih banyak diterapkan untuk kepentingan reformasi pemerintahan atau birokrasi, namun dapat diterapkan juga untuk pembangunan masyarakat, melalui PKBM yang memiliki arti sebagai usaha terorganisasi untuk memperbaiki kehidupan suatu komunitas serta peningkatan kemampuan berinteraksi dan berkembang secara mandiri baik dalam hal sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun ketrampilan. Penerapan konsep pengembangan kemampuan untuk pembangunan masyarakat diarahkan untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengontrol sepenuhnya kehidupan dan lingkungannya, mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dan mencari pemecahannya. Dalam penilaian Osborne dan Gaebler, yang dikutip oleh Yoyon Suryono (2007:46), pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan yaitu: a) masyarakat lebih memiliki komitmen terhadap para anggotanya daripada pemerintah, b) masyarakat lebih memahami persoalan yang dihadapinya daripada pihak luar, c) masyarakat lebih fleksibel dan kreatif daripada organisasi lain yang lebih besar,

d) masyarakat mampu menegakkan standar perilaku secara lebih efektif daripada birokrasi atau organisasi swasta lainnya.

Pendekatan kedua, yang dapat digunakan untuk pengembangan PKBM adalah **Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**, Dimana dalam konsep pemberdayaan ini mengandung dua pengertian, pertama, pemberdayaan merupakan pemberian kekuatan atau kewenangan (*to give power or authority to*), kedua pemberdayaan adalah memberi kekuatan atau kemampuan (*to give ability to or enable*), Berdasarkan pengertian diatas Bank Dunia (dalam Syahyuti, 2006), pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan secara individual maupun suatu kelompok suatu masyarakat. Masyarakat yang telah berdaya diidikasikan oleh adanya pemilikan kebebasan dalam pilihan dan tindakan sendiri.

Dalam konteks pendidikan luar sekolah, istilah pemberdayaan masyarakat pertama kali dikemukakan oleh Suzanne Kindervatter pada tahun 1979 dalam disertasinya yang berjudul: *Nonformal Education as Empowering Process*. Menurut Kindervatter (dalam Zainuddin Arif, 2003) pemberdayaan merupakan upaya agar masyarakat memperoleh pemahaman dan kemampuan mengontrol kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik agar mereka dapat meningkatkan posisinya dalam masyarakat. Kelompok masyarakat atau individu yang posisinya meningkat ditandai oleh dimilikinya, (1) akses dan peluang yang tinggi, (2) daya tawar kolektif yang tinggi, (3) kemampuan memilih berbagai pilihan, (4) status citra diri dan perasaan positif terhadap identitas dirinya, (5) kemampuan kritis dan kemampuan menggunakan pengalaman untuk menilai potensi yang memberikan keuntungan, (6) legitimasi dalam arti kebutuhan masyarakat dipertimbangkan sebagai sesuatu yang logis dan adil, (7) mampu menentukan sendiri standar pekerjaan yang dilakukan bersama orang lain dan (8) mempunyai persepsi yang kreatif yaitu mempunyai pandangan yang lebih positif terhadap hubungan dirinya dan lingkungannya. Dari sudut pandang manajemen, Cook dan Maculay (Zainuddin Arif, 2003), mendefinisikan pemberdayaan sebagai instrumen yang dipergunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggungjawab, dalam arti keterlibatan para anggota dalam pembuatan keputusan dan tanggungjawab. Atas dasar dua pengertian

diatas, Zainuddin Arif( 2003), menyimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan usaha untuk memungkinkan masyarakat kecil yang dianggap kurang berfungsi agar meningkat dan mempunyai kemampuan lebih baik atas peran dalam sistem sosialnya melalui pemberian kewenangan kepada warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Dalam kaitannya dengan pengembangan PKBM, pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih bermakna sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja PKBM agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, memberdayakan program-program PLS yang dikelola oleh PKBM, memberdayakan para warga belajar dan membangkitkan potensi kelompok sasaran atau warga belajar agar mereka memiliki kemampuan mengendalikan kekuatan lingkungannya. Oleh karena itu agar PKBM dapat mengembangkan hal diatas, Zainuddin Arif menyarankan adanya beberapa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan kelompok belajar, yang berfungsi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari: 1) membentuk kelompok kecil sebagai perencanaan; 2) membentuk kelompok belajar; 3) memilih dan melatih tutor; 4) mengaktifkan kelompok belajar; 5) mengadakan pertemuan fasilitator/tutor; 6) mendorong dan membantu kegiatan kelompok belajar; 7) menciptakan hubungan antar kelompok dan 8) melakukan evaluasi.

## **Penutup**

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu institusi pendidikan nonformal yang tumbuh dan berdiri atas prakarsa masyarakat akan dapat berkembang manakala penyelenggara program maupun para pemangku kepentingan memiliki kesamaan persepsi dalam peningkatan kualitas hidup warga masyarakat yang mengalami marginalisasi. Oleh karena itu dalam makalah singkat ini menawarkan gagasan dalam pengembangan PKBM menuju PKBM yang mandiri, mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi para peserta pelatihan dalam membawa PKBM yang lebih berdaya.

## Daftar Pustaka

Djuju Sudjana, (2000). *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Fallah Production.

Nur Djazifah ER, dkk (2005). *Pemetaan tingkat Pencapaian Mutu Pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan penelitian kelompok, Yogyakarta: Jurusan PLS FIP UNY.

Yoyon Suryono (2007). *Peningkatan Kemampuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*. Yogyakarta: UNY Press

Zainuddin Arif (2003). *Pengelolaan dan Pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Makalah